

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

1. TPAK tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas tenaga kerja atau kurangnya efisiensi dalam pasar tenaga kerja. Meskipun TPAK mencerminkan tingkat keterlibatan angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi, tetapi juga oleh aspek lain seperti produktivitas, tingkat pendidikan, serta keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja.
2. Dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, efisiensi ekonomi serta daya saing tenaga kerja meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
3. Inovasi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendukung teori pertumbuhan ekonomi endogen yang menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan efisiensi, meningkatkan

daya saing, dan menghasilkan nilai tambah. Inovasi Daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam beradaptasi dengan perubahan global, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi.

4. Secara simultan, TPAK, IPM, dan ID memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kolaborasi antara peningkatan partisipasi angkatan kerja, kualitas SDM, dan pengembangan inovasi daerah menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
5. Variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah inovasi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi inovasi daerah yang paling kecil dalam hasil uji parsial, mengindikasikan bahwa inovasi memiliki peranan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi daerah memungkinkan terciptanya solusi baru, peningkatan efisiensi layanan publik, dan pengembangan produk bernilai tambah, sehingga berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Implikasi

1. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan manusia sebagai strategi utama untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi ini dapat diarahkan pada tiga dimensi utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Dalam dimensi pendidikan, pemerintah dapat mengadopsi program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi, yakni program angkutan pelajar gratis yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Program ini memfasilitasi siswa-siswi untuk berangkat dan pulang sekolah tanpa biaya, menggunakan angkutan kota (angkot) yang disewa khusus oleh pemerintah daerah. Selain meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar, terutama dari keluarga kurang mampu, program ini juga meringankan beban biaya transportasi orang tua serta memberdayakan para sopir angkot lokal. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor pendidikan, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli. Peningkatan konsumsi ini, dalam teori makroekonomi, berkontribusi langsung pada percepatan laju PDRB.

Pada dimensi kesehatan, pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal dan wilayah kepulauan. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, penyediaan kapal cepat untuk memfasilitasi mobilisasi masyarakat di daerah terpencil menjadi solusi efektif. Kapal cepat ini berperan dalam memperlancar akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan terdekat, terutama dalam situasi darurat. Peningkatan konektivitas ini akan membantu mengurangi keterlambatan penanganan medis dan memastikan masyarakat di daerah terisolasi tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Dengan demikian, produktivitas masyarakat dapat tetap terjaga, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam dimensi standar hidup layak, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi ketat terhadap program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun PKH bertujuan membantu masyarakat miskin meningkatkan taraf hidup, kenyataannya, implementasi di lapangan masih sering salah sasaran. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki mekanisme pendataan dan pengawasan agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Ketepatan sasaran ini penting untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memperkuat investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, pemerintah tidak hanya membangun fondasi pembangunan manusia yang kuat, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi ini menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

2. Inovasi daerah harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu diberdayakan untuk menciptakan dan mengimplementasikan inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, baik melalui reformasi pelayanan publik maupun pengembangan produk unggulan berbasis inovasi. Salah satu contoh konkret yang patut dicontoh adalah *Jakarta Smart City*, sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efektivitas tata kelola kota.

Program ini berfokus pada enam pilar utama: *smart governance* (pemerintahan cerdas), *smart economy* (ekonomi cerdas), *smart environment* (lingkungan cerdas), *smart people* (masyarakat cerdas), *smart mobility* (mobilitas cerdas), dan *smart living* (kehidupan cerdas). Salah satu produk unggulannya adalah aplikasi *JAKI* (Jakarta Kini), yang memungkinkan warga mengakses layanan publik secara terpadu, mulai dari pelaporan masalah kota, informasi lalu lintas, hingga layanan kesehatan.

Selain itu, Jakarta Smart City juga mengembangkan sistem pengendalian banjir berbasis teknologi, di mana sensor-sensor dipasang di berbagai titik strategis untuk memantau kondisi sungai, curah hujan, dan potensi genangan secara real-time. Upaya ini didukung oleh platform *Jakarta Satu*, sebuah sistem integrasi data geospasial yang menggabungkan informasi dari berbagai perangkat daerah agar pengambilan keputusan lebih efektif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Belajar dari keberhasilan Jakarta Smart City, pemerintah daerah lain di Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip serupa dengan membangun pusat inovasi daerah. Pusat ini akan berfungsi sebagai laboratorium pengembangan teknologi lokal, wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, serta ruang untuk menguji dan menerapkan solusi inovatif sesuai kebutuhan spesifik daerah. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi jargon, melainkan motor penggerak daya saing daerah secara berkelanjutan

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data yang digunakan. Pada tahun 2022, terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan jumlah provinsi di Indonesia bertambah dari 34 menjadi 38 provinsi. Namun, dalam penelitian ini, analisis hanya dilakukan terhadap 34 provinsi yang sudah ada sebelum pemekaran, baik untuk tahun 2021, 2022, maupun 2023. Keputusan ini diambil untuk menjaga konsistensi data dan menghindari ketidakseimbangan dalam perbandingan antar tahun. Namun, keterbatasan ini dapat memengaruhi generalisasi hasil penelitian terhadap kondisi ekonomi di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran.

